



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

RABU, 19 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

PEMOHON

Dahlan Hasan Nasution dan Aswin

TERMOHON

KPU Kabupaten Mandailing Natal

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 09.12 WIB – 09.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Dahlan Hasan Nasution
2. Aswin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janter Manurung
2. Heber Sihombing

C. Termohon:

1. Fadhillah Syarief (KPU Kab. Mandailing Natal)
2. Muhammad Yasir Nasution (KPU Kab. Mandailing Natal)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Hasan Muaziz

E. Bawaslu:

1. Maklum Pelawi (Bawaslu Kab. Mandailing Natal)
2. Ahmad Iswadi (Bawaslu Kab. Mandailing Natal)
3. Henry (Bawaslu Prov. Sumatera Utara)
4. Suhadi (Bawaslu Prov. Sumatera Utara)
5. Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI)

F. Calon Pihak Terkait:

Atika Azmi Utammi Nasution

G. Kuasa Hukum Calon Pihak Terkait:

1. Lutung Guntur Rambe
2. Ahmad Syofyan Hussein Rambe
3. Adi Mansar

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 dimulai, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kuasa Hukum Pemohon (...)

3. KETUA: SALDI ISRA

Coba suaranya agak dikeraskan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami dari Kuasa Hukum Pemohon, hadir atas nama Janter Manurung. Kemudian, di sebelah saya ada Heber Sihombing.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Yang hadir siapa? Janter Manurung, siapa lagi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Heber Sihombing.

7. KETUA: SALDI ISRA

Heber Sihombing. Saya cek dulu, ya, Surat Kuasanya. Sebagai Pihak Terkait ... Kuasa Pemohon, Janter Manurung, Heber Sihombing.
Oke. Ada yang lain yang hadir melalui ... apa ... online?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Secara online, kita mau ... kita sudah ajukan semua Kuasa Hukum, Yang Mulia, termasuk Prinsipal kami.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, ada Prinsipal juga yang hadir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.
Termohon, siapa yang hadir?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Termohon yang hadir di sidang luring, Prinsipal yang diwakili oleh Divisi Hukum Bapak Muhammad Yasir Nasution dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Hifdzil Alim. Kemudian, di sidang daring ada Ketua KPU Mandailing Natal, Bapak Fadhillah Syarief dan didampingi oleh Kuasa Hukum Muhammad Hasan Muaziz.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, yang hadir Kuasa Hukum dengan Prinsipal, ya? siapa Prinsipalnya?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Yasir Nasution.

15. KETUA: SALDI ISRA

Yasir Nasution?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Yang lainnya di ... apa ... melalui (...)

18. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Daring.

19. KETUA: SALDI ISRA

Online?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Bawaslu, siapa yang hadir? Silakan!

22. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Izin, Yang Mulia.

Yang Bawaslu Mandailing Natal ini hadir Saudara Maklum Pelawi dan saya sendiri Ahmad Iswadi. Dan di daring, itu ada Pak Fritz, sama Bang Henry, sama Pak Suhadi melalui daring dari Kantor Bawaslu RI, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Jadi, yang hadir di sini dua-duanya Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, ya?

24. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Lalu, di daring ada juga anggota Bawaslu, tambah Bawaslu RI Pak Fritz, ya?

26. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Pak Fritz Edward Siregar?

28. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Ya. Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Ini harus diklirkan nama Beliau ini.

30. BAWASLU: AHMAD ISWADI

Ya. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA

Nah kemudian, di luar kotak kita ini masih hadir calon Pihak Terkait. Nah, nanti akan diberi tahu, apakah Permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait itu dikabulkan atau tidak oleh Mahkamah. Nanti ... Anda tunggu nanti menjelang ... apa ... pengesahan bukti atau sekitar setelah pengesahan bukti, nanti akan kita beri tahu. Sementara, Saudara boleh mendengar, tapi tidak boleh bersuara dulu karena belum punya hak itu. tapi, enggak apa-apa juga kalau Anda mau memperkenalkan diri calon Pihak Terkait, siapa?

32. KUASA HUKUM CALON PIHAK TERKAIT: LUTUNG GUNTUR RAMBE

Terima kasih, Yang Mulia.

Calon Pihak Terkait hadir secara langsung saya sendiri Guntur Rambe. Kemudian, sebelah saya ada Ahmad Syofyan Hussein Rambe. Kemudian, daring ada rekan kami Dr. Adi Mansar. Kemudian, calon bupati ... Calon Wakil Bupati Terpilih, Ibu Atika Azmi Utammi Nasution.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Jadi, ini lengkap, ya. Hadir Kuasa Hukum, Pak Guntur ... Guntur Rambe dengan Pak Ahmad Syofyan, ya? Lalu, ada juga melalui daring dan ada juga Prinsipal Calon Wakil Bupati Bu Atika Nasution, ya? Terima kasih.

Sekarang agenda persidangan adalah mendengar Permohonan Pemohon. Lalu kemudian, akan disahkan bukti yang diajukan. Dan nanti kita akan sampaikan keputusan Mahkamah soal Permohonan sebagai Pihak Terkait. Sebelum Anda menyampaikan atau Kuasa menyampaikan pokok-pokok Permohonan, perlu diberi ... disampaikan.

Satu. Bahwa yang disampaikan kepada Mahkamah itu hanya terkait dengan apa yang diperintahkan dalam putusan Mahkamah, terkait pemungutan suara ulang. Jadi, yang tidak diperintahkan oleh Mahkamah, itu dianggap sudah selesai. Jadi, tidak boleh lagi diungkit-ungkit. Jadi, kalau ada ... ini tiga TPS, ya, yang di-PSU? Nah, itu yang disampaikan ke Mahkamah, itu hanya menyangkut tiga TPS itu saja. Itu satu.

Yang kedua. Kalau Anda ... Anda sudah menyampaikan alat bukti, kalau ada bukti tambahan, itu masih dimungkinkan, sepanjang disampaikan menjelang persidangan berikutnya. Jadi, kalau misalnya persidangan berikutnya itu jatuh hari jumat, Anda sudah bisa menyampaikan hari ... hari ini sampai hari Jumat, setengah jam menjelang sidang itu. Semakin cepat semakin baik, supaya kami bisa memverifikasi.

Begitu juga Termohon, kalau mau mengajukan bukti, tolong disampaikan lebih awal supaya bisa diverifikasi. Dan Bawaslu begitu juga. Nanti kalau misalnya Pihak Terkait dikabulkan, kalau ada bukti juga disiapkan. Sehingga di sidang berikutnya, kita sudah sahkan bukti-bukti itu. Dan sangat mungkin bukti-bukti itu akan dikonfrontir langsung di sini, di sidang berikutnya, supaya ada kejelasan terhadap apa yang menjadi pokok Permohonan dalam perkara a quo. Ya, bisa didengar oleh Pemohon, ya? Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Calon Pihak Terkait. Terima kasih.

Sekarang Pemohon atau Kuasa Pemohon dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kami sudah menerima Permohonan Saudara bertanggal ... apa ... sebentar, Permohonan Saudara yang diregistrasi dengan Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 itu pada hari Kamis, 6 Mei, ya, 2021, pukul 15.00 WIB, benar?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Perbaikan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan sampaikan pokok-pokok permohonannya saja.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Kalau suara Anda tidak jelas gara-gara ada face shield itu, nah ditanggalkan face shield itu supaya agak bisa kedengaran. Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Pemohon, langsung membacakan pokok-pokok permohonan, sehingga pembukaan sampai dengan ... sampai dengan tenggang waktu permohonan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Masuk ke pokok permohonan saja, ya. Yang lainnya itu dianggap dibacakan. Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Pokok permohonan. Bahwa perolehan masing-masing paslon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu setelah dilakukannya pemungutan suara ulang pada 3 TPS, yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di dua TPS, yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyabungan Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina Tahun 2020.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten menjadi sebagai berikut. Dalam Tabel 2, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ini hasil PSU, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir pada tingkat kabupaten pasca PSU tersebut, perolehan hasil masing-masing paslon adalah menjadi sebagai berikut, sebagaimana Tabel 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Untuk Tabel 3 itu di TPS berapa itu? Kan ada Tabel 2, ada Tabel 3. Halaman 10 ada Tabel 3?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Tabel 3, itu perolehan di TPS ... di 3 TPS. Kemudian yang Tabel 4 itu, Yang Mulia, setelah ... hasil perolehan akhir setelah dikurangi.

47. KETUA: SALDI ISRA

Kalau Tabel 2 itu di?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Di TPS ... di 3 TPS.

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terus?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Mohon maaf, Yang Mulia. Kami ulangi. Di Tabel 3 itu hasil perolehan pemungutan suara ulang pada 3 TPS.

51. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kemudian setelah digabungkan itu, hasilnya menjadi Tabel 4, Yang Mulia. Secara keseluruhan.

53. KETUA: SALDI ISRA

(Ucapan tidak terdengar jelas)? Silakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami lanjutkan.

Bahwa hasil perolehan akhir ... suara akhir masing-masing paslon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86 dan seterusnya yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tepatnya perolehan Paslon Nomor Urut 1 diperoleh dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas luber dan jujur bertentangan dengan prinsip demokrasi dan fairness, serta melanggar hak-hak asasi manusia dalam menggunakan hak pilihnya.

Bahwa hasil perolehan suara akhir masing-masing paslon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86 dan seterusnya yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana Tabel 5, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Jadi ini Tabel 5 ini perolehan suara menurut Pemohon, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Pada tabel di atas, Pemohon merupakan paslon dengan perolehan suara terbanyak, yaitu=79.002 suara. Bahwa keunggulan perolehan suara Pemohon tersebut diperoleh setelah perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 pada PSU di 3 TPS tersebut, yaitu sebanyak 369 suara dikurangi semuanya atau dinolkan karena diperoleh dengan proses dan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Selanjutnya, perolehan suara Pemohon tetap dianggap sah, yaitu 450 suara, sehingga perolehan akhir masing-masing paslon menjadi sebagaimana Tabel 5 di atas, yaitu peroleh memperoleh ... hasil perolehan suara terbanyak, yaitu sebanyak 79.002 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon menjadi berkurang jauh dari Paslon Nomor Urut (...)

59. KETUA: SALDI ISRA

Itu di halaman berapa itu yang dibacakan? Jangan dibacakan yang tidak ada dalam permohonan, ya!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa yang Anda bacakan sementara ini?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Di halaman ... di halaman 13, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 13. Poin berapa?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Jadi poin 6 ini kita ringkas, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Diringkas?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul.

67. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami ulangi. Bahwa perolehan suara Pemohon menjadi berkurang jauh dari Paslon Nomor Urut 1 pada saat PSU pada 3 TPS tersebut yang notabene merupakan basis suara Pemohon adalah dikarenakan

Termohon melakukan keberpihakan terhadap Paslon Nomor Urut 1 secara sistematis dalam bentuk tindakan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut.

Termohon mengubah jumlah DPT pada 3 TPS dalam pemungutan suara ulang dengan alasan pencermatan, yaitu ada yang telah meninggal dunia, pindah alamat, dan tidak dikenal, sebagaimana Berita Acara Nomor 682/PL.02.1-Berita Acara/1213/KPU-KAB/IV/2021 tanggal 22 April 2021, sehingga DPT berkurang sebanyak 81 orang atau total DPT menjadi 791 orang.

Bahwa ternyata berdasarkan berita acara pada tanggal 23 April 2021 dari DPT pencermatan tersebut, Formulir C-Pemberitahuan Ulang KWK tersebut hanya disebar sebanyak 592 surat undangan dan 199 surat undangan dikembalikan dengan berbagai alasan, yaitu meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, dan lain-lain. Alasan ini menurut Pemohon sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan Berita Acara Pencermatan DPT pada tanggal 22 April tersebut. Karena pada pencermatan tersebut sudah disortir berdasarkan pemutakhiran penduduk pada 3 TPS tersebut, namun dalam Berita Acara tanggal 23 April 2021 masih memuat alasan meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, dan lain-lain, dan sangat dipertanyakan adanya 125 orang yang tidak dapat ditemui.

Tindakan pencermatan atau menurut Pemohon pemutakhiran DPT pada 3 TPS dalam rangka pemungutan suara ulang tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan PSU. Karena dari tanggal pencermatan dan penyebaran undangan tersebut dilakukan hanya selang 1 hari sebelum pemungutan suara ulang. Tentu berakibat pada tidak tersebarnya C-Pemberitahuan ... C-Pemberitahuan Ulang KWK tersebut secara maksimal, yaitu setelah dihitung Pemohon hanya tersebar sebesar 66,3%.

Bahwa rangkaian peristiwa sebagaimana angka 6.1 sampai dengan 6.3 di atas, menurut Pemohon merupakan bentuk nyata ketidaksiapan, ketidakseriusan, dan ketidakprofesionalan Pemohon dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemungutan suara ulang, kalau tidak mau disebut sebagai upaya keberpihakan atau kerja sama Termohon dengan Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa selain itu, upaya pencermatan DPT yang dilakukan oleh Termohon sampai kepada tidak tersebarnya Surat Pemberitahuan Ulang KWK tersebut kepada semua orang dalam DPT pencermatan tersebut, mengakibatkan banyak pemilik hak suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 24 April tersebut yang sudah barang tentu mempengaruhi perolehan-perolehan ... perolehan Pemohon, dimana pada 3 TPS PSU tersebut merupakan bagian dari basis suara Pemohon.

Bahwa setelah mencermati jumlah DPT sebanyak 791 pada 3 TPS untuk pemungutan suara ulang, dihubungkan dengan jumlah surat undangan Model C-Pemberitahuan Ulang KWK yang berhasil tersebar tersebut oleh Pemohon sebanyak 592 dan jumlah surat suara yang digunakan pada tanggal 24 April 2021 tersebut ternyata sebanyak 827 surat suara. Pemohon mempertanyakan selisih penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan (C-Pemberitahuan Ulang KWK) yang tersebar dan total DPT setelah pencermatan tersebut yang sangat tidak rasional bagi Pemohon.

69. KETUA: SALDI ISRA

Ya, sebentar dulu! Jadi, ini antara undangan yang Anda dalilkan 592, tapi kemudian yang menggunakan hak suara 827 begitu, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, ada orang yang menurut dalil Anda itu menggunakan hak suaranya tanpa kemudian ada surat panggilan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ini yang kita pertanyakan, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA

Yang dipertanyakan, ya? Nanti biar mereka menjawab. Ini supaya clear saja.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Poin 4.2, ya, 4.2.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Karena memiliki selisih yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah surat suara sah, jumlah surat suara yang digunakan, serta mohon izin, Yang Mulia, kata *serta* ini kami renvoi dengan menghapus perolehan suara masing-masing pada paslon pemungutan (...)

79. KETUA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Di poin berikutnya tadi, Yang Mulia, di halaman (...)

81. KETUA: SALDI ISRA

Tadi yang saya minta ditegaskan itu di halaman 15. Ini yang renvoi Anda itu di halaman berapa?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Di halaman 15, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 15 di mana itu?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Di 6.6.

85. KETUA: SALDI ISRA

6.6. Oke, terus yang mana yang direnvoi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Yang direnvoi hanya kata *serta* saja, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA

Oh, *serta, ya?* Dan *perolehan suara* itu, *ya?*

88. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ya.

89. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Dan perolehan masing-masing paslon pada pemungutan suara ulang tersebut, Termohon tidak mengakomodir hak pemilik suara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS pada saat PSU dengan berbagai alasan, yaitu sebagai berikut.

Bahwa Termohon tidak mengakomodir hak memilih pemilih suara di Desa Kampung Baru di TPS 001 atas nama Saudara Antonius Nainggolan yang bersangkutan merupakan warga Desa Kampung Baru dan terdaftar di DPT TPS 001 Desa Kampung Baru, serta memiliki kartu undangan dan pada saat pemungutan suara ulang suara tanggal 9 Desember 2020 yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.

Bahwa (...)

91. KETUA: SALDI ISRA

Jadi sebentar dulu! Antonius Nainggolan itu dia menggunakan hak pilihnya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Pada saat PSU tidak bisa menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia. Pada saat tanggal 9 Desember 2020 yang lalu yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya.

93. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Pada saat PSU tidak diperkenankan.

95. KETUA: SALDI ISRA

Terus, silakan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa selain itu, Termohon pada TPS tidak mengakomodir hak-hak pemilik suara untuk menggunakan hak suaranya karena tidak mendaftar ... tidak terdaftar pada DPT dan tidak memiliki kartu undangan, padahal para pemilik suara tersebut merupakan warga pada TPS tersebut. Datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, namun tidak dimasukkan dalam DPT oleh PPS setempat untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya.

Bahwa akibat dari tidak diakomodirnya hak pilih para pemilik suara sebagaimana dimaksud (...)

97. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu dulu, sebelum Anda lanjutkan! Ini poin 9 ini Anda menambah, ya? Ada pemilih yang mempunyai ... yang sebetulnya mempunyai hak pilih, tapi datang tidak diakomodasi begitu?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA

Datang ke tempat pemungutan suara?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul.

101. KETUA: SALDI ISRA

Anda bisa sebutkan enggak siapa saja?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ada di daftar bukti, Yang Mulia, di surat pernyataan.

103. KETUA: SALDI ISRA

Di daftar bukti, ya. Karena begini, itu perlu ditegaskan untuk poin 8 Anda sebutkan nama orangnya dalam Permohonan, tapi untuk angka yang 9 ini di halaman 16 itu, tidak disebutkan. Oke, nanti kami cek buktinya. Silakan lanjutkan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Bahwa dari akibat dari tidak diakomodirnya hak pilih para pemilik suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 di atas, mengakibatkan keributan di TPS sampai menjelang waktu pemungutan suara berakhir (menjelang Pukul 13.00 WIB). Pada saat kejadian, jelas tidak ada upaya dari Bawaslu Kabupaten Madina untuk memediasi penyelenggara dengan pemilik hak suara di TPS untuk dapat diberikan hak menggunakan hak suaranya, mengakibatkan sebanyak 192 orang pemilik suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021 tersebut.

Bahwa sangat jelas dan beralasan menurut hukum (...)

105. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu sebentar! Itu 192 itu di 1 TPS atau 3 TPS?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Di 1 TPS, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA

Di 1 TPS ini? 192 orang?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Di 1 TPS.

109. KETUA: SALDI ISRA

Itu Bukti P-10 itu apa yang Anda maksudkan?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ini ada ... mohon izin, Yang Mulia, sebentar. Di Bukti P-10 itu, Yang Mulia, itu ada video keributan itu, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA

Ada video, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ya, di TPS.

113. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti kita lihat videonya, ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjutkan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Bahwa sangat jelas dan beralasan menurut hukum hal-hal yang kami uraikan pada angka 7 sampai dengan 10 tersebut di atas sangat mempengaruhi perolehan akhir masing-masing paslon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya pada tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana objek permohonan yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa Termohon, Bawaslu Kabupaten Madina, dan aparat keamanan diduga telah berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1, kalau tidak mau kami sebut bekerja sama untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1, dalam bentuk sebagai berikut.

Bahwa selain itu, pihak Bawaslu Kabupaten Madina, Termohon, dan aparat penegak hukum diduga telah bekerja sama untuk berpihak kepada salah satu paslon, yaitu dengan cara membiarkan Paslon Nomor Urut 1 dapat melakukan kampanye terselubung dan money politics secara leluasa di berbagai tempat. Menurut Pemohon, dugaan tersebut sangat beralasan karena kegiatan tersebut bisa luput dari pantauan Bawaslu Kabupaten Madina dan KPU Kabupaten Madina (...)

117. KETUA: SALDI ISRA

Anda ini dalil nomor 12 ini buktinya apa ini yang mendukung?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Buktinya ada video kampanye dan (...)

119. KETUA: SALDI ISRA

Ya, bukti berapa? Ini Anda (ucapan tidak terdengar jelas) ini.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ada di P-12, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA

Bukti P-12, ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ya.

123. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kita cek, soalnya di sini tidak dicantumkan bukti berapa
itu. Jadi kalau ada video segala macam, nanti kita akan buka itu.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Baik, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, dilanjutkan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Mohon izin kami tambahkan video-video tersebut mengenai
kampanye terselubung, itu ada di P-16 juga, P-17, kemudian di P-19,
Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA

Di dalam satu flashdisk? Berbeda flashdisk atau satu flashdisk?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Masing-masing.

129. KETUA: SALDI ISRA

Oke, nanti kita cek.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa selain itu, Pihak Bawaslu Kabupaten Madina, Termohon, dan aparat penegak hukum diduga telah bekerja sama untuk berpihak kepada salah satu paslon, yaitu dengan cara membiarkan Paslon Nomor Urut 1 dapat melakukan kampanye terselubung dan money politics secara leluasa diberbagai tempat. Menurut Pemohon, dugaan tersebut (...)

131. KETUA: SALDI ISRA

Itu tadi sudah! Lanjut ke poin 13. Itu yang saya klarifikasi tadi.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Madina telah memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk pembiaran, segala bentuk rangkaian kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pengasawan mana sesuai tupoksinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal Bawaslu Kabupaten Madina telah menerbitkan Surat Imbauan Nomor 0049 dan seterusnya pada tanggal 31 Maret 2021, imbauan tersebut menurut Pemohon hanya isapan jempol belaka, sekalipun dasar hukum surat imbauan tersebut merupakan Undang-Undang Pilkada dan peraturan KPU yang jelas memiliki konsekuensi hukum, yaitu sanksi pidana dan administratif.

133. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi ini gini. Poin 13, poin 14 itu menyangkut ... apa namanya ... dugaan Anda keberpihakan penyelenggara, termasuk Bawaslu, termasuk aparat keamanan, ya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Ya.

135. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, kalau dibacakan semua, bisa lama jadinya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Baik.

137. KETUA: SALDI ISRA

Terus Anda mau masuk ke poin berapa?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Masuk di poin 15, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA

15? Silakan.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Bahwa tindakan-tindakan money politics tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi (...)

141. KETUA: SALDI ISRA

Enggak perlu dibacakan, ya, nanti kami bisa baca.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa segala bentuk kampanye terselubung atau ilegal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selain telah dilarang oleh Bawaslu Kabupaten Madina dalam bentuk surat imbauan adalah sangat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara ... Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

143. KETUA: SALDI ISRA

Oke, poin 16 itu Anda mau menyatakan bahwa Bawaslu telah melarang, ya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA

Nah, tadi di poin sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Bawaslu tidak melakukan apa-apa, nanti biar dijawab oleh ... apa ... Termohon dan Bawaslu nanti.

Silakan lanjutkan ke poin berikutnya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik bahwa selain itu, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wakil ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA

Ya, dianggap dibacakan.

148. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami teruskan poin 18.

149. KETUA: SALDI ISRA

Poin 18 silakan.

150. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Bahwa berdasarkan segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Termohon, Bawaslu Kabupaten Madina, dan Paslon Nomor Urut 1, sebagaimana kami uraikan di atas adalah

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

152. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami lanjutkan dengan poin 19.

Bahwa karenanya, sangat beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menyatakan perolehan Paslon Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon, sepanjang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 TPS, yakni TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pada pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 tidak sah dan batal demi hukum. Dan selanjutnya, menyatakan sah dan mengikat perolehan suara Pemohon sepanjang 3 TPS dalam pemungutan suara ulang tersebut.

153. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Kami lanjutkan dengan 21, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Bahwa karenanya, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi kepesertaan Paslon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina Tahun 2020 yang pelaksanaannya dilanjutkan melalui pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 atau setidaknya menyatakan perolehan Paslon Nomor Urut 1 pada pemungutan suara ulang tanggal 24 April tersebut harus dinolkan, atau dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, atau memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon Nomor 724 ... Nomor 724/PY.02-

Kpt/12-13/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 24 ... 26 April 2020 Pukul 16.10 WIB dan selanjutnya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Madina dan Termohon untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 dengan segala akibat hukumnya.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724 ... 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16.10 WIB.
3. Menyatakan Paslon Nomor Urut 1 atas Nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi didiskualifikasi dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi pada pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
Perolehan suara pada Paslon Nomor Urut 1=78.787 suara.
Perolehan Nomor Urut 2=79.002 suara.
Perolehan Nomor Urut 3=44.949 suara.
Tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia, semua.
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 sejak putusan ini diucapkan.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Kabupaten Mandailing ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, atas nama Kuasa Hukum Janter Manurung dan Heber Sihombing.

Terima kasih, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Termohon, Anda jelas, ya, apa yang dimohonkan, apa yang didalilkan? Nanti tugas Anda untuk menjelaskan, Termohon, tentu dengan bukti-bukti. Begitu juga dengan Bawaslu, ada banyak sekali disebut ini di ... oleh Pemohon. Anda harus juga menjelaskan, memberikan ... menerangkan kepada kami dengan bukti-bukti apa yang tadi didalilkan, ya? Nah, itu.

Jadi, ya, apa yang disampaikan ke kita dalam forum persidangan ini karena ini hanya menyangkut tiga TPS, harusnya Termohon bisa juga menjelaskan lebih klir terhadap dalil-dalil itu. Ini kan tidak ribuan atau ratusan TPS seperti yang sebelumnya, hanya tiga TPS saja. Nanti dijelaskanlah ke Mahkamah, begitu juga dengan Bawaslu.

Yang Mulia Pak Manahan, disilakan!

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Hanya menegaskan karena tadi kan, tenggang waktu tidak dibacakan, ya? Hanya menjelas ... mohon penjelasan lebih lanjut. Permohonan ini diajukan tanggal berapa? Kemudian, itu keputusan KPU sebagai objek Permohonan itu diumumkan tanggal berapa? Sehingga, kita bisa melihat bahwa ... bahwa Permohonan ini diajukan sesuai dengan ketentuan tentang tenggang waktu. Di halaman 8 ini, ya, mohon ditegaskan lagi. Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon, ini yang mengaju ... tanggal 28 ini yang melalui online, ya? Baru dia datang perbaikan, baru dibuatkan lagi Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 6 Mei 2021?

159. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

3 Mei, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, coba dijelaskan lebih lanjut!

161. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Baik. Permohonan terhadap objek Permohonan ini, Permohon ... objek Permohonan diumumkan pada tanggal 26 April 2020 (...)

162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. 26, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Pukul 16.10 WIB.

164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Dan Permohonan a quo ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara online pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 15.45 WIB sesuai dengan APPP Nomor 143 dan seterusnya. Kemudian, Perbaikan Permohonan kita ajukan pada tanggal 3 Mei 2021 (...)

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

167. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, perbaikannya tanggal 3 Mei. Namun, yang di ... ya, diregister di Mahkamah tanggal 6 Mei.
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.
Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan! Cukup?
Jadi, sudah cukup dari Majelis. Sebelum kita mengesahkan bukti, diberitahukan bahwa Mahkamah memutuskan bahwa Permohonan sebagai Pihak Terkait dikabulkan oleh Mahkamah dan silakan Saudara masuk ke ruangan ini.
Nah, sekarang dengan dikabulkannya itu, Anda sudah punya hak yang lain. Tapi untuk sesi kali ini, kita hanya mau mendengarkan Pemohon saja. Hak Anda sebagai Pihak Terkait baru nanti akan digunakan di persidangan berikutnya untuk memberikan keterangan

sebagai Pihak Terkait, ya. Ada lagi yang mau ditambahkan oleh Pemohon?

170. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

Hanya mau menyampaikan secara resmi, sebagaimana tadi penyampaian Yang Mulia di awal. Bahwa kami akan mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA

Oke, nanti boleh ya, sepanjang menjelang persidangan berikutnya ya. Biar kami punya waktu untuk mengklarifikasi.

172. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Izin, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu dulu, ini siapa ini? Ini siapa?

174. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Dahlan Hasan Nasution, Yang Mulia. Sebagai Prinsipal.

175. KETUA: SALDI ISRA

Ini prinsipal? Tunggu dulu!

176. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Siap, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA

Pak Prinsipal ditunggu dulu ya!

178. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Siap, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA

Soal bukti-bukti bisa ditambahkan, sepanjang itu disampaikan menjelang persidangan berikutnya, agar kami bisa mengklarifikasi. Lalu nanti itu yang akan disahkan bukti tambahan Saudara, ya. Ya, itu, oke. Silakan Prinsipal apa yang akan disampaikan?

180. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Bahwa pada tanggal 6 April di rumah ... Nasution sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1, dan dihadiri oleh Atikah, mereka mengadakan kampanye terselubung dan membagi-bagikan uang.

181. KETUA: SALDI ISRA

Oke, oke.

182. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Dan juga termasuk Adi Mansar selaku kuasa hukum mereka juga ikut di situ, menyampaikan sambutan untuk memilih Nomor Urut 1.

183. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Pak Prinsipal, tadi sudah disampaikan oleh Kuasa Bapak ya. Jadi Bapak tidak perlu menegaskan apa yang kurang-kurang, Bapak sampaikan saja ke kuasa Bapak nanti.

184. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Siap, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA

Jadi itu gunanya kita ada kuasa hukum, Pak. Kecuali nanti kami memerlukan penjelasan dari Bapak di sidang-sidang berikutnya nanti. Nah, itu.

186. PEMOHON: DAHLAN HASAN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia, mohon maaf.

187. KETUA: SALDI ISRA

Ya, enggak apa-apa kita maafkan karena masih dalam suasana Hari Raya, saling memaafkan kita ini. Oke, jadi sudah tidak ada lagi ya, cukup ya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

189. KETUA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu, kita sahkan bukti. Pemohon sampai hari ini persidangan sekarang, Anda mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-88?

190. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Betul, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA

Betul, ya, itu sudah di apa ... dicek dan lengkap bukti Saudara disahkan ya.

KETUK PALU 1X

Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, serta Pemohon, dengan demikian sidang kita untuk hari ini (...)

192. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum ditutup.

193. KETUA: SALDI ISRA

Ya, apa lagi Termohon ini, silakan.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Termohon mengajukan inzage untuk alat bukti Pemohon, kalau diperkenankan.

195. KETUA: SALDI ISRA

Inzage?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Ya.

197. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti boleh, nanti Anda boleh kalau mau ada yang inzage, melihat ... apa ... bukti-bukti dari Pemohon disilakan nanti. Nanti berhubungan dengan kepaniteraan.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Nah, sebelum sidang ditutup, kami beritahukan bahwa sidang berikutnya akan ditunda ... sidang hari ini akan ditunda sampai dengan hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, pukul 19.30 WIB. Maaf, pukul 09.30 WIB.

Jadi ulangi. Hari Jumat, 21 Mei 2021, pukul 09.30 WIB. Acara kita pada hari itu adalah mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, mendengarkan keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti. Jadi, ada 3 yang akan didengar dan sangat mungkin dalam proses ini nanti hari Jumat akan ada klarifikasi-klarifikasi dari Majelis kepada semua yang hadir di persidangan ini. Itu.

Yang kedua, sekali lagi, kalau ada bukti yang Anda rasa penting, yang Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu rasa penting, tolong dilengkapi, diserahkan ke Mahkamah. Jadi nanti tidak ada lagi penyesalan, aduh kami kalau diberi kesempatan begini, akan menyampaikan ini dan segala macamnya. Ini kan susah begitu. Kata orang yang dimenangkan Mahkamah, "Nah, ini adil ini." Kata yang ditolak permohonannya, "Waduh, Mahkamah ini tidak adil." Nah, dicarilah alasan itu.

Jadi kami sampaikan kepada semua yang hadir, kalau masih ada bukti yang dirasa penting untuk mendukung dalil, tolong disampaikan, agar kami bisa membaca bukti itu secara komprehensif, begitu. Oke ya, Pemohon?

200. KUASA HUKUM PEMOHON: JANTER MANURUNG

Cukup, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA

Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait cukup ya? Anda sudah diberi duduk di sini dan sudah diterima sebagai Pihak Terkait. Karena tidak ada lagi ... ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan? Yang Mulia Pak Daniel? Cukup.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.54 WIB

Jakarta, 19 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

